

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pertama kali merebak di Ibukota Provinsi Hubei - China pada bulan Desember 2019, Corona Virus atau yang lebih dikenal dengan istilah Covid-19 secara cepat terus menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Virus yang awalnya muncul di kota Wuhan China ini hingga pada 31 Juli 2021 telah mewabah di 222 negara di dunia dengan jumlah korban terinfeksi 198.010.967 orang, 4.224.124 orang meninggal dunia dan 178.907.063 dinyatakan sembuh.¹

Pada tanggal 30 Januari 2020, badan kesehatan dunia WHO yang dipimpin oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus mulanya menyatakan Covid-19 hanya sebagai sebuah wabah atau *Global Health Emergency*. Namun melihat tingkat penularannya yang sangat cepat hampir di seluruh dunia, akhirnya pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global (*Global Pandemic*) dan meminta negara- negara di dunia untuk melakukan tindakan mendesak dan agresif dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini.²

Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang sedang menerpa hampir di seluruh penjuru dunia. Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.³ Sedangkan WHO menyebut bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Dengan demikian, bencana sangat berkaitan erat dengan situasi dan kondisi yang terjadi

¹ <https://www.worldometers.info/coronavirus/>? (diakses : 15 September 2021).

² <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-corona-virus-2019> (diakses tanggal 15 September 2021).

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

dalam kehidupan masyarakat.⁴ Karena itu penanganannya harus melibatkan banyak pendekatan dan keterlibatan berbagai bidang ilmu.

Meskipun, sejak Januari 2020 di berbagai belahan dunia sudah panik dengan Covid-19, Pemerintah Indonesia baru mengumumkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Saat itu Presiden Joko Widodo sendiri yang langsung mengumumkan dari Istana Negara bahwa di tanah air sudah terdapat 2 (dua) orang pasien yang positif tertular Covid-19. Jokowi mengatakan dua orang positif tersebut adalah ibu dan anak yang memiliki riwayat menjalin komunikasi erat dengan warga negara Jepang yang terinfeksi Covid-19 yang datang ke Indonesia.⁵ Setelah pengumuman itu, hari-hari berikutnya hingga hampir satu setengah tahun ruang diskusi publik bangsa ini didominasi oleh informasi penambahan pasien positif Covid-19 dan penyebarannya yang sangat cepat di seluruh provinsi di tanah air. Hingga 31 Juli 2021 data *update* Covid-19 Indonesia menyatakan bahwa kasus konfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 3.409.658 orang, 94.119 orang meninggal dunia dan 2.770.092 orang dinyatakan sembuh. Angka ini diprediksi terus bertambah mulai saat penemuan pertama tanggal 2 Maret 2020. Dalam kurun waktu hampir 18 (delapan belas) bulan, kasus positif Covid-19 telah mendekati angka 3,5 juta orang.⁶

Provinsi Aceh yang berada paling ujung barat Indonesia tidak terlepas dari penyebaran (*transmission*) Covid-19. Data menunjukkan bahwa hingga akhir Juli 2021 terdapat 23.045 orang yang dinyatakan positif Covid-19, 16.901 orang diantaranya sembuh dan 988 orang lainnya meninggal dunia.⁷ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh menginformasikan bahwa sebagian warga yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dan kontak langsung penderita serta sebagian lagi terinfeksi dari transmisi lokal.

⁴ Elsevier Mukti, A.G dan A.Winarna, *Manajemen Resiko Bencana dalam Konstruksi Masyarakat Tanggung Bencana* (Yogyakarta : Mizan, 2012), h.27.

⁵ <https://www.nasionalkompas.com/read/2020/03/04/08051361/pengumuman-mendadak-jokowi-yang-kejutkan-pasien-positif-corona> (diakses tanggal 15 September 2021).

⁶ <https://www.covid19.go.id> (diakses tanggal 15 September 2021).

⁷ <https://www.dinkes.acehprov.go.id> (diakses tanggal 15 September 2021).

Publikasi data di *website* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di tanah air maka Provinsi Aceh adalah provinsi dengan jumlah penambahan kasus harian positif Covid-19 yang relatif kecil dibandingkan 28 (dua puluh delapan) provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi Aceh menempati rangking keenam sebagai provinsi terendah kasus harian Covid-19 di Indonesia dengan 228 orang positif Covid-19, setelah Sulawesi Barat yang teratat hanya 169 orang, Sulawesi Tenggara 162 orang, Gorontalo 119 orang, Maluku 43 orang dan Maluku Utara hanya penambahan 22 orang terkonfirmasi positif Covid-19.⁸

Selanjutnya jika dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di pulau Sumatera, Aceh menempati rangking ketiga sebagai provinsi terendah positif Covid-19 baik dilihat dari jumlah penduduk terkonfirmasi positif Covid-19 maupun dilihat dari persentase penduduk yang terkonfirmasi positif Covid-19. Aceh menempati rangking ketiga sebagai provinsi terendah Covid-19 di Sumatera setelah Provinsi Jambi hanya dengan 20.253 orang serta Provinsi Bengkulu hanya dengan 17.817 orang terkonfirmasi positif Covid-19.⁹

Posisi Provinsi Aceh di rangking keenam terendah positif Covid-19 dari 34 provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dan rangking ketiga dari 10 provinsi di Sumatera dilihat dari angka penambahan kasus harian positif Covid-19, akumulasi angka positif Covid-19 dan tingkat kesembuhan pasien yang positif Covid-19. Angka-angka ini terjadi setelah Provinsi Aceh mengalami tiga kali gelombang penyebaran Covid-19, yaitu gelombang pertama (*first wave*) yang terjadi sejak penetapan masa Tanggap Darurat oleh Pemerintah Pusat melalui BNPB yaitu tanggal 28 Januari 2020 dan berlangsung hingga 23 April 2020. Pada saat itu warga Aceh yang berada di provinsi-provinsi lain bahkan dari negeri jiran (wilayah pandemi) pulang ke Aceh dengan pertimbangan adanya penetapan pembatasan sosial bahkan *lockdown* oleh pemerintah daerah/negara setempat.

Gelombang kedua (*second wave*) terjadi saat memasuki bulan puasa Ramadhan dan perayaan Idul Fitri hingga berakhirnya perayaan Idul Adha

⁸ <https://www.kemkes.go.id/covid-19> (diakses tanggal 15 September 2021).

⁹ <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-232309845/update-terbaru-sebaran-corona-indonesia-sabtu-31-juli-2021> (diakses tanggal 15 September 2021)

1441 H tahun 2020. Pada saat tersebut terjadi mobilisasi warga yang mudik atau menikmati puasa Ramadhan dan merayakan Hari Raya di kampung halamannya masing-masing. Mobilisasi warga yang tinggi ini telah meningkatkan angka penyebaran Covid-19 karena dalam penyebarannya Covid-19 membutuhkan media atau manusia yang telah terinfeksi untuk berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain (*carier*). Demikian pula gelombang ketiga (*third wave*), ini terjadi menjelang bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri hingga akhir perayaan Idul Adha 1442 H, yaitu bulan Maret hingga akhir Juli 2021. Gelombang ketiga ini relatif menyumbangkan penambahan angka positif Covid-19 karena warga masyarakat yang menahan diri untuk tidak merayakan hari raya di tahun lalu (2020) cenderung “balas dendam” merayakannya di tahun 2021.¹⁰

Para Akademisi dan Praktisi serta Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang peduli kesehatan di Provinsi Aceh termasuk diantaranya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah Provinsi Aceh pada akhir April 2020 pernah memprediksi akan terjadi lonjakan angka signifikan bahkan akan terjadi ledakan angka positif Covid-19 mulai pada gelombang kedua (*second wave*) di Aceh.¹¹ Prediksi mereka ternyata tidak sepenuhnya menjadi kenyataan karena penambahan angka positif Covid-19 memang terjadi namun tidak menimbulkan angka positif yang signifikan. Mulai tanggal 30 Juli 2020 Provinsi Aceh mencatat penambahan angka positif Covid-19 sebanyak 45 orang. Penambahan 45 orang ini merupakan angka penambahan tertinggi yang pertama kali terjadi di Aceh. Data juga menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 telah menyebar di hampir 23 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. Mulai tanggal tersebut, data positif Covid-19 relatif bertambah dan kembali tercatat data positif Covid-19 tertinggi terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020 yaitu sebanyak 168 orang.¹² Demikian pula di gelombang ketiga (*third wave*), sebelumnya semua pihak di Aceh juga memperkirakan akan terjadi lonjakan yang signifikan angka positif Covid-19 dan

¹⁰ Harian Serambi Indonesia, edisi 26 April 2021.

¹¹<https://aceh.tribunnews.com/2020/04/23/idi-ingatkan-potensi-serangan-tahap-ii> (diakses tanggal 15 September 2021).

¹² <https://www.dinkes.acehprov.go.id> (diakses tanggal 15 September 2021).

mempengaruhi posisi ranking Aceh sebagai salah satu provinsi terendah positif Covid-19, namun perkiraan tersebut juga tidak sepenuhnya menjadi kenyataan.

Sikap pesimis para Akademisi, Aktivis dan Praktisi kesehatan yang memprediksi akan adanya lonjakan angka positif Covid-19 di Aceh bukanlah tanpa dasar. Provinsi Aceh secara aksesibilitas berpotensi memberikan peluang bagi penyebaran Covid-19. Akses darat, laut dan udara memberi kesempatan kepada siapapun untuk masuk ke wilayah teritorial Aceh. Demikian pula situasi kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik dan keagamaan, kondisi-kondisi ini juga berpotensi memberi peluang bagi penyebaran Covid-19.

1. Aspek Akses Wilayah

Provinsi Aceh memiliki akses-akses wilayah sebagai berikut :

a. Akses lalu lintas udara

Provinsi Aceh memiliki 13 Bandar Udara (Bandara) dengan klasifikasi 2 (dua) *International Airport* dan 11 (sebelas) *Domestic Airport*.

b. Akses lalu lintas laut

Provinsi Aceh memiliki 18 (delapan belas) pelabuhan laut dengan klasifikasi 8 (delapan) Pelabuhan Ferry dan 10 Pelabuhan Laut Ekspor Impor.

c. Akses lalu lintas darat

Provinsi Aceh memiliki 3 pintu masuk yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu : Kabupaten Aceh Tenggara– Kabupaten Karo, Kabupaten Aceh Tamiang – Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Aceh Singkil – Kabupaten Dairi.¹³ Akses-akses wilayah ini memberikan peluang mobilitas warga dari luar Aceh ke wilayah Provinsi Aceh, baik secara *legal* maupun *illegal* (terutama dari negeri jiran Singapura dan Malaysia serta Australia).

2. Aspek Sosial Ekonomi

- a. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat.

¹³ <https://www.dishub.acehprov.go.id> (diakses tanggal 15 September 2021).

- b. Ketimpangan pendapatan telah meningkat selama pandemi sebagai guncangan ekonomi paling kuat yang berdampak pada rumah tangga termiskin dan paling rentan.

3. Aspek Sosial Budaya :

- a. *Woe u gampong*

Tradisi mudik atau pulang kampung saat pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan Hari Pertama dan perayaan Idul Fitri serta Idul Adha. Kedua momen Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah momen (kesempatan) orang-orang pulang kampung menjenguk orang tua dan mengunjungi kerabat dekat untuk sekedar bersilaturahmi. Tradisi ini sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya, dan akan terus dipertahankan sampai sekian tahun ke depan, mengingat masyarakat Aceh adalah pemeluk agama Islam yang fanatik, sejak nenek moyangnya. Kesempatan ini digunakan untuk saling bersilaturahmi baik dengan kerabat dekat maupun kerabat jauh, bahkan dengan sesama sahabat lama yang sejak lama berpisah karena pekerjaan dan tempat tinggal.

- b. *Listening Culture*

Dalam mengkonsumsi informasi masyarakat Aceh lebih dominan mendengar. Budaya ini akan kesulitan ketika dihadapkan dengan informasi berisi himbauan atau aturan-aturan/protokol-protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang dominan dalam bentuk tulisan dan gambar.

- c. *Mitos*

Sebagian tokoh dan masyarakat Aceh percaya bahwa Covid-19 ini adalah wabah yang disebabkan oleh makhluk halus (*ta'uen*) yang akan hilang dengan ritual mengusir setan atau iblis.

- d. *Spekulasi*

Beredar isu pada sebagian tokoh masyarakat Aceh bahwa Covid-19 adalah sejenis senjata biologis yang dengan sengaja diproduksi dan disebarkan

oleh negara tertentu untuk menghancurkan dan menginvasi negara lain dengan tujuan menguasai dunia secara politik dan ekonomi.¹⁴

e. Perubahan karakter, sikap dan perilaku

Efek pasca konflik panjang dan bencana alam Gempa dan Tsunami 2004, telah merubah karakter, sikap dan perilaku masyarakat Aceh menjadi individualisme, hedonisme dan pragmatisme.¹⁵

4. Aspek Keagamaan :

- a. Protokol kesehatan Covid-19 yang meminta warga berada di rumah telah menimbulkan persepsi yang keliru dari sebagian Tokoh Agama dan ini sangat mempengaruhi para pengikutnya. Protokol tersebut dipersepsikan sebagai pelarangan beribadah di Masjid atau Meunasah, padahal yang ada hanyalah pembatasan atau pengaturan dalam tata cara beribadah.
- b. Sebagian kalangan masyarakat mempersepsikan bahwa Covid-19 itu adalah “Tentara Allah” yang akan membunuh manusia kebatilan di muka bumi dan orang-orang yang beribadah akan terselamatkan darinya. Hal ini dianggap biasa oleh masyarakat dan tidak peduli apa yang sedang terjadi.
- c. Sebagian masyarakat Aceh lainnya menganggap bahwa Covid-19 ini adalah bala yang harus diakhiri dengan memperbanyak ibadah dan ritual- ritual zikir massal dengan mengumpulkan dan melibatkan banyak orang.
- d. Karena sifatnya yang agamis, masyarakat Aceh sangat mudah tersinggung jika ada aturan baru yang menurut mereka bersinggungan bahkan bertentangan dengan ritual keagamaan.¹⁶

5. Aspek Dinamika Politik Lokal, hubungan politik antara Pemerintah Aceh sebagai Lembaga Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

¹⁴ <https://www.m.detik.com/2020/04/04/viral-bupati-pidie-bicara-virus-corona-senjata-biologis-ini-penjelasan-pemkab> (diakses tanggal 15 September 2021).

¹⁵ Irwan Abdullah, *Rekonstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2006), h.131.

¹⁶<https://m.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan> (diakses tanggal 15 September 2021)

sebagai Lembaga Legislatif sedang berada dalam kondisi yang tidak harmonis. Hal ini sangat mempengaruhi setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 yang kerap menuai kritikan dari pihak DPRA selaku legislatif.

Melewati tiga kali gelombang penyebaran Covid-19 yang luar biasa dengan segala faktor-faktor penghambat penanganan Covid-19, Provinsi Aceh tetap tercatat memiliki angka relatif kecil positif Covid-19 dan setara dengan beberapa provinsi lain sebagai provinsi dengan ranking terendah penyebaran Covid-19. Tak ayal, pada tanggal 27 Mei 2020. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta selaku Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Aceh dengan maksud meminta kepada Gubernur Aceh untuk dapat berbagi praktik baik (*best practices*) dalam penanganan Covid-19 bagi provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia.¹⁷

Provinsi Aceh juga tercatat beberapa kali mengalami angka nihil positif Covid-19 yaitu pada tanggal 13 Mei 2020, 12 November 2020, 25 Januari 2021 dan 16 Maret 2021. Pada tanggal 18 Juli 2021, Aceh juga tercatat sebagai provinsi dengan kasus positif Covid-19 terendah secara nasional.¹⁸ Tingkat kesembuhan tertinggi pasien Covid-19 secara nasional juga pernah dicapai oleh Aceh.¹⁹

Demikian pula Badan Dunia PBB *World Health Organization* (WHO) pernah memetakan Provinsi Aceh sebagai satu-satunya zona berwarna kuning pada Peta Indonesia dalam *Situation Report-64* WHO tanggal 21 Juli 2021.²⁰

¹⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2020/05/29/surati-pemerintah-aceh-pusat-minta-aceh-bagi-pengalaman-cara-tangani-covid-19> (diakses tanggal 15 September 2021).

¹⁸ Harian Serambi Indonesia, edisi 19 Juli 2021.

¹⁹ Harian Serambi Indonesia, edisi 27 Januari 2021.

²⁰ <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/26/who-nilai-kasus-covid-19-aceh-paling-rendah-di-indonesia>. (diakses tanggal 15 September 2021).



Gambar 1
Peta Laporan Situasi Covid-19 Indonesia periode 15-21 Juli 2021.

Selain itu, pada tanggal 1 Februari 2021 Provinsi Aceh juga tercatat sebagai provinsi dengan Tingkat Kepatuhan yang tinggi (82,5%) dalam menerapkan Protokol Kesehatan. Angka persentase ini merupakan hasil monitoring langsung pihak Bidang Perubahan Prilaku Satgas Covid-19 Nasional.²¹ Pihak Satgas Covid-19 Nasional juga mencatat kenaikan angka kepatuhan penegakan Protokol Kesehatan pada periode 12-18 Juli 2021 yaitu: sekitar 88,91 % masyarakat yang dimonitor telah memakai masker, dan 91,14 % makin menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Kendati kedua perilaku ini belum dilaksanakan secara sempurna (bersamaan atau paralel) namun persentase pencapaian tersebut harus diapresiasi.²²

Tidak hanya itu, Provinsi Aceh juga menerima anugerah tingkat nasional berupa *Innovative Government Award 2020* sebagai Provinsi paling inovatif menjalankan roda pemerintahan dimasa pandemi Covid-19. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Aceh pada tanggal 18 Desember 2020 di Jakarta.²³

Fakta saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, namun data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Aceh yang menjadi korban keganasan Covid-19 relatif kecil dibandingkan dengan masyarakat di beberapa provinsi lain

²¹ Harian Serambi Indonesia, edisi 4 Februari 2021.

²² <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2021/07/22/891/kepatuhan-protokol-kesehatan-masyarakat-aceh-kian-baik.html> (diakses tanggal 15 September 2021).

²³ <https://dialeksis.com/berita/aceh-terima-penghargaan-innovative-government-award-2020> (diakses tanggal 15 September 2021).

di Indonesia. Fakta ini tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19. Gugus Tugas ini telah banyak melakukan langkah-langkah cepat dan penting serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Melihat tantangan yang cukup besar ditambah dengan serangan berita-berita *hoax* berisi kampanye negatif (*black campagne*) terhadap upaya penanganan Covid-19 di media sosial dalam intensitas yang besar, Pemerintah Aceh terindikasi memiliki strategi-strategi komunikasi yang dirancang khusus agar seluruh program-program serta kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini terlaksana dengan baik. Dari amatan awal, ditemukan teknik-teknik atau strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam kegiatan komunikasi publik dengan tujuan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat Aceh untuk bersama-sama melawan Covid-19. Strategi-Strategi Komunikasi inilah yang kemudian di-*breakdown* oleh Pemerintah Aceh ke dalam program-program dan kegiatan komunikasi publik penanganan Covid-19 di Aceh.

Karena tantangan yang dihadapi demikian besar, maka strategi komunikasi menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, partisipasi dan peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan. Komunikasi adalah cara terbaik dalam mencapai kesuksesan mitigasi bencana. Kemampuan mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada Publik, Pemerintah, Media dan Pemuka Masyarakat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana.²⁴

Kegiatan Komunikasi akan berjalan efektif apabila komunikator memahami benar tentang kultur komunikannya. Penyusunan strategi komunikasi yang baik, setidaknya telah memenangkan setengah dari pertempuran, dalam hal ini adalah pertempuran melawan pandemi global Covid-19.²⁵

²⁴ Haddows and Kims, *Disaster Communication, In a changing Media World* dalam Rudianto, *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19* (Yogyakarta : Buku Litera, 2020), h.7.

²⁵ Chrosky dan Mehrly, *The effect of Disorganization and Nonfluency on Attitude Change and Source Credibility* dalam Anang Masduki, *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19* (Yogyakarta : Buku Litera, 2020), h.62.

Berdasarkan data dan fakta serta dikaitkan dengan 2 (dua) pendapat teori tadi, penulis menemukan indikasi sejumlah strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Hal tersebut terlihat dari publikasi data dan informasi di beberapa *platform* media sosial, berita-berita dari surat kabar lokal maupun nasional serta data dan informasi yang dipublikasikan secara resmi dalam laman-laman *website* resmi Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan semua fenomena tersebut melalui sebuah penelitian yang diberi judul : **Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh (Perspektif Komunikasi Islam).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana efektifitas strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam penerapan strategi komunikasi penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh ?
4. Bagaimana dampak penerapan strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis efektifitas strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh.
3. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam penerapan strategi komunikasi Penangnpnan Covid-19 di Provinsi Aceh.
4. Untuk menganalisis dampak apa saja yang ditimbulkan dalam penerapan strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek, yakni aspek teoritis dan aspek praktis. Kedua aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai khasanah pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan berguna bagi masyarakat, komunitas kampus, akademisi, para peneliti serta penulis sendiri. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar teori untuk untuk diuji pada penelitian-penelitian lanjutan dengan topik yang sama.

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *role model* bagi penanganan bencana, wabah atau pandemi-pandemi lainnya dimasa yang akan datang di Provinsi Aceh. Fokus model ini adalah pada penerapan Strategi Komunikasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Aceh sehingga berbagai upaya penanganan Covid-19 dapat terlaksana dengan baik.
- b. Selain Pemerintah Aceh, *role model* Strategi Komunikasi ini diharapkan juga akan dapat diadopsi oleh pemerintah provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama atau hampir sama dengan Provinsi Aceh.

E. Batasan Istilah

Untuk menyatukan persepsi dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam Disertasi ini, maka dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi Komunikasi

Secara istilah (*etimology*) strategi berarti tak-tik, siasat, metode atau teknik. Sedangkan secara bahasa (*terminology*), strategi pada mulanya dipakai oleh kalangan militer yang diartikan sebagai seni dalam merancang operasi dalam peperangan. Sun Tzu, seorang Jenderal Perang dan filsuf yang meletakkan dasar-dasar filsafat militer di Cina menyatakan bahwa Strategi adalah serangkaian rancangan operasi untuk menundukkan dan mengalahkan

musuh, terutama terkait gerakan pasukan dan navigasi ke dalam posisi yang dipandang paling menguntungkan untuk meraih kemenangan.²⁶

Strategi komunikasi adalah metode, teknik atau cara penyampaian pesan yang efektif kepada khalayak yang dapat memberi efek sesuai yang diharapkan. Pesan-pesan yang diterima khalayak pada waktu bersamaan bukan hanya dari satu sumber, melainkan dari sumber yang banyak, karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk mengungguli pergumulan satu sama lain sehingga efektif mencapai sasaran perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan.²⁷ Efek adalah paduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam keseluruhan proses komunikasi. Pesan sebagai kekuatan andalan yang dimiliki oleh komunikator harus mampu mengungguli semua kekuatan yang ada untuk menciptakan efektifitas. Kekuatan sebuah pesan dapat didukung oleh media, metode penyajian dan kekuatan kepribadian komunikator sendiri.

Pencapaian komunikasi yang efektif dibutuhkan beberapa aspek penunjang lainnya, yaitu : a) mengenal khalayak lebih *intens* agar mampu berkomunikasi secara lebih efektif; b) menyusun pesan yang tepat agar materi komunikasi juga lebih tepat sasaran; c) menetapkan metode penyampaian supaya pesan-pesan yang disampaikan bisa mencapai komunikan secara cepat, tepat dan efektif; d) selektif dalam penggunaan media, agar komunikasi yang dilakukan tidak justru buang-buang waktu dan energi melainkan sesuai dengan selera dan keinginan komunikan.²⁸

Istilah strategi komunikasi yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah teknik atau metode komunikasi yang dirancang oleh Pemerintah Aceh agar pesan-pesan tentang Penanganan Covid-19 yang disampaikan kepada masyarakat dapat berhasil atau efektif, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas maksudnya bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh, sedangkan secara kuantitas maksudnya bahwa pesan yang dikirim mampu menjangkau seluruh wilayah

²⁶ Joko Prasetya & Abu Ahmadi, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005), h.11.

²⁷ Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek* (Jakarta : Graha Ilmu, 2009) , h.183

²⁸ *Ibid*, hal 184 – 203.

dan mayoritas masyarakat dalam Provinsi Aceh. Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh juga dianggap efektif jika pesan dapat diterima dan memiliki efek perubahan sikap yang signifikan dari Masyarakat Aceh.

2. Pemerintah Aceh

Pemerintah Provinsi Aceh yang kemudian disebut dengan Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh.²⁹ Pemerintah Aceh membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Aceh sebagai lembaga teknis dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh.³⁰

Sebagai lembaga pemerintah daerah, Pemerintah Aceh memiliki struktur yang lengkap yaitu meliputi berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang menjalani pelimpahan tugas-tugas yang lebih teknis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh. Selain Satuan Kerja atau Perangkat Daerah di atas, Pemerintah Aceh juga memiliki perwakilan pemerintahan di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota 290 (dua ratus sembilan puluh) Kecamatan di seluruh Provinsi Aceh.

Baik Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan bekerja melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam dua aspek, yakni : berdasarkan kebijakan (tupoksi) dan berdasarkan inisiatif sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam hal penanganan dan penanggulangan Wabah Covid-19, umumnya kebijakan yang dijalankan berdasarkan petunjuk dari pemerintah atasan; apakah pemerintah pusat di Jakarta atau pemerintah provinsi, agar semua kebijakan berjalan efektif dan terpusat. Tidak terkecuali langkah kuratif dalam penanganan wabah dan pasien terinfeksi Covid-19, juga upaya-upaya preventif bagi kalangan masyarakat yang belum terkena wabah Covid-19.

3. Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan secara komprehensif berkaitan dengan Pencegahan dan Pengendalian Pandemi

²⁹ Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³⁰ S.E Mendagri No. 440/2622/SJ Tgl 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.

Covid-19. Kedua upaya ini ditujukan untuk menekan bahkan menghentikan penyebaran Covid-19.³¹ Kendati Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa Protokol Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 ini, Pemerintah Aceh dituntut berinovasi untuk menyesuaikan protokol-protokol tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah serta kultur Masyarakat Aceh.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum Disertasi yang membahas tentang Strategi Komunikasi Pemerintah Aceh dalam Penanganan Covid-19 yang ditinjau dari perspektif Komunikasi Islam, secara sistematis pembahasannya dirinci sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar dan dorongan penelitian ini dilakukan, dilengkapi dengan rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Kepustakaan menguraikan tentang definisi umum Strategi Komunikasi, Komunikasi Islam, Komunikasi Bencana, Covid-19, Kajian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian, Kerangka Teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah penelitian terdiri dari : Teori Difusi Inovasi, Teori Agenda Setting, Teori *Two Step Flow*, Teori Norma Budaya dan Teori Efek Media. Pada Bab ini juga disertakan informasi-informasi pengayaan tentang deskripsi Pemerintah Aceh dan Covid-19.

Bab III Metodologi Penelitian berisi penegasan metode penelitian yang dipakai, waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, instrumen pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan serta analisis data dan teknik menjaga keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengurai 2 (dua) hal yaitu tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang kondisi umum lokasi penelitian, strategi-strategi komunikasi Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh, Efektifitas strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Aceh dan menganalisis lebih dalam hambatan-hambatan yang

³¹ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-corona-virus-2019> (diakses tanggal 15 September 2021)

dihadapi. Berikutnya yang kedua adalah bagian Pembahasan yang menganalisis lebih dalam antara semua temuan data dan informasi penelitian dengan konsep atau kerangka teori yang digunakan serta hubungannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab V Penutup merangkum hasil penelitian yaitu berupa kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan dari empat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta saran-saran yang konstruktif.

